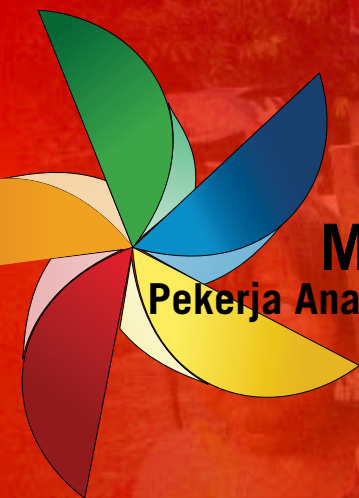




International
Labour
Organization

Jakarta



Menghapus Pekerja Anak di Indonesia:

Dukungan **25** Tahun

Bersama Bisa

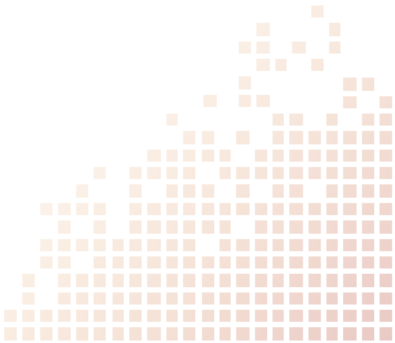
"Together it's possible"



Menghapus

Pekerja Anak di Indonesia:

Dukungan 25 Tahun





Daftar Isi

Daftar Singkatan

3

Peran ILO

4

Pendahuluan

5

Memahami Masalah Pekerja Anak

8

Pencapaian Utama

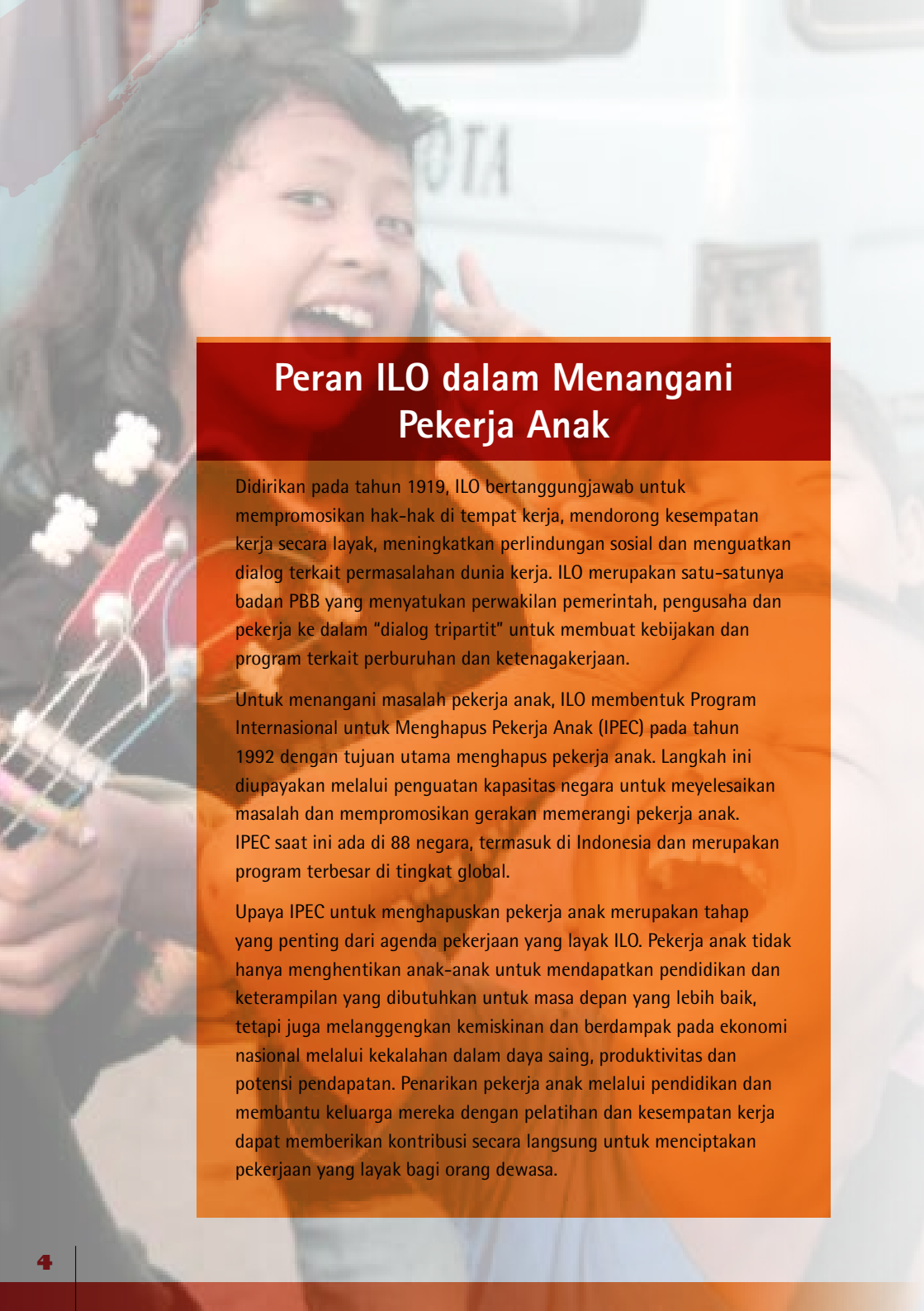
9

Dasawarsa Selanjutnya

49

Daftar Singkatan

3Rs	Hak (<i>Rights</i>), Tanggung jawab (<i>Responsibility</i>) dan Keterwakilan (<i>Representation</i>). Perangkat bagi pelatih untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender, hak, tanggung jawab dan keterwakilan di antara anak-anak, kaum muda dan dewasa yang berisiko menjadi pekerja anak dan terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak untuk menjadi pekerja maupun eksploitasi seksual.
BKP	Bimbingan karier dan pendidikan.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah.
BPS	Badan Pusat Statistik.
BPTA	Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. ILO mendefinisikannya sebagai pekerjaan di lingkungan berbahaya, perbudakan atau bentuk lain dari kerja paksa, kegiatan terlarang termasuk perdagangan narkoba dan prostitusi, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata.
DME	Desain, Manajemen, dan Evaluasi. Program pelatihan tentang desain, manajemen, dan evaluasi aksi terhadap perburuan anak.
EAST	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Kaum Muda.
ILO	Organisasi Perburuan Internasional.
IPEC	Program Internasional untuk Menghapus Perburuan Anak.
JARAK	Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak.
KAB	Know About Business. Metodologi pelatihan untuk menciptakan kesadaran tentang kewirausahaan di antara kaum muda.
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat.
KPN	Komite Pengarah Nasional.
K3	Keselamatan dan kesehatan Kerja.
PKH	Program Keluarga Harapan. Program bantuan tunai bersyarat untuk mengurangi kemiskinan.
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia.
PKSA	Program Kesejahteraan Sosial Anak. Program bantuan tunai langsung untuk kesejahteraan sosial anak, termasuk di dalamnya PKSA.
PPA – PKH	Penghapusan Pekerja Anak, untuk mendukung Program Keluarga Harapan. Program penarikan pekerja anak sebagai upaya mendukung Program Keluarga Harapan.
RAN	Rencana Aksi Nasional.
SCREAM	Mendukung hak anak-anak melalui pendidikan, seni dan media. Seperangkat paket pendidikan untuk membantu kaum muda mengesresikan diri mereka melalui berbagai cara seperti media yang artistik. Misalnya drama, penulisan kreatif, musik dan seni visual sesuai budaya dan tradisi.
SYB	Start Your Business, Memulai Usaha Anda. Program pelatihan untuk memulai kewirausahaan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki ide usaha.
SMP	Sekolah Menengah Pertama.
USDOL	Departemen Perburuan Amerika Serikat.



Peran ILO dalam Menangani Pekerja Anak

Didirikan pada tahun 1919, ILO bertanggungjawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial dan menguatkan dialog terkait permasalahan dunia kerja. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja ke dalam "dialog tripartit" untuk membuat kebijakan dan program terkait perburuhan dan ketenagakerjaan.

Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak. IPEC saat ini ada di 88 negara, termasuk di Indonesia dan merupakan program terbesar di tingkat global.

Upaya IPEC untuk menghapuskan pekerja anak merupakan tahap yang penting dari agenda pekerjaan yang layak ILO. Pekerja anak tidak hanya menghentikan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga melanggengkan kemiskinan dan berdampak pada ekonomi nasional melalui kekalahan dalam daya saing, produktivitas dan potensi pendapatan. Penarikan pekerja anak melalui pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja dapat memberikan kontribusi secara langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa.

Kolaborasi ILO dan Indonesia dalam Menangani Pekerja Anak: Pendahuluan

Melalui struktur tripartitnya yang unik, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah bekerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja untuk menangani berbagai isu yang kompleks terkait pekerja anak di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Buku kecil ini menyajikan kemitraan yang telah terjalin panjang antara ILO dan konstituennya, serta pemangku kepentingan melalui tonggak-tonggak pencapaian, pembelajaran dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi.

Penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 1992 antara pemerintah Indonesia dengan ILO untuk melaksanakan Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC), menandai awal kampanye kerja sama jangka panjang ILO untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pekerjaan eksploitatif. Nota Kesepahaman ini dibangun berdasarkan kegiatan sebelumnya di Indonesia terkait advokasi hak-hak anak, yang dimulai tahun 1979 yaitu saat pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, dan diikuti oleh Keputusan Menteri tentang Pekerja Anak tahun 1987. Nota ini juga menandai dimulainya kerja sama ILO dengan Indonesia melalui pelaksanaan program IPEC untuk menanggulangi penyebab pekerja anak serta melindungi anak-anak Indonesia dari masa depan mereka.

Kerja sama ILO–pemerintah Indonesia ini kemudian diperkuat lagi tahun 1993, ketika Deklarasi tentang Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan pada Konferensi Nasional pertama tentang Pekerja Anak, yang menghimbau pemerintah untuk mempromosikan penegakan hukum, meningkatkan program pendidikan, dan melanjutkan penelitian tentang perburuhan anak.ⁱ

Deklarasi ini berdampak signifikan selama dua dasawarsa terakhir, hal ini dapat dilihat dari banyaknya inisiatif tentang pengembangan kebijakan, kapasitas dan pembangunan lembaga, dialog sosial, dan intervensi langsung dalam berbagai bidang seperti pendidikan, advokasi dan kampanye, dan perbaikan kondisi kerja.

Beberapa intervensi utama dan pembelajaran selama 20 tahun terakhir direfleksikan dalam lima tonggak pencapaian: Meningkatkan kesadaran tentang pekerja anak (1992-1996); Menuju pendekatan berbasis sektor (1997-2001); Meningkatkan kesempatan hidup untuk anak-anak (2002-2006); dan Menangani pekerja anak melalui pendidikan (2007-2011).

Sekilas:

20 Tahun Kerjasama Pemerintah Indonesia-ILO dalam Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak

1992-1996

1992:
Penanda-
tanganan Nota
Kesepahaman

1993:
Pembentukan
Komite Pengarah
Nasional untuk
IPEC

1993:
Deklarasi
Penghapusan
Pekerja Anak

1997-2001

1997:
Penandatanganan
Nota Kesepahaman
Kedua

1999:
Ratifikasi Konvensi ILO No. 139
tentang Usia Minimum Anak-
anak Boleh Bekerja

2000:
Ratifikasi Konvensi
ILO No. 182 tentang
Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak

2001:
Pembentukan Komite
Aksi Nasional untuk
Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak

Pencapaian-pencapaian ini juga menunjukkan bagaimana kemitraan yang telah terjalin selama 20 tahun ini telah berevolusi, bertransformasi fokus dan pendekatannya dalam menangani pekerja anak. Hal ini adalah hasil dari proses pembelajaran secara terus-menerus antara pemangku kepentingan yang terlibat. ILO, bersama-sama dengan pemerintah, kemitraan sosial dan organisasi non-pemerintah menangani pekerja anak dan permasalahannya di Indonesia, yakin bahwa tidak ada jalan pintas untuk menghapuskan pekerja anak ini. Semua perlu diupayakan secara terus-menerus dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang panjang serta komitmen dari pemerintah akan Indonesia yang bebas pekerja anak di tahun 2022.

2002-2006

2007-2012

2002:

Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

2002:

Kabupaten Kutai Kartanegara mendeklarasikan sebagai Zona Bebas Pekerja Anak-pertama di dunia (dilaporkan pada Konferensi Perburuhan Internasional 2008)

2003:

UU Tenaga Kerja (mengadopsi sebagian dari Konvensi ILO 182)

2003:

Keputusan Menteri No. 235 tentang Pekerjaan yang membahayakan bagi moral, keselamatan dan kesehatan anak-anak

2003:

UU Sistem Pendidikan Nasional (mendefinisikan pelatihan keterampilan yang menjadi acuan program pra-vokasional dan vokasional)

2007:

Program Keluarga Harapan diluncurkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan mengarusutamakan permasalahan pekerja anak

2008:

Program menarik pekerja anak untuk mendukung PKH (PPA – PKH)

2008:

Program Kesejahteraan Sosial Anak

2009:

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penyusunan Rencana Aksi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedang berjalan: Peta Jalan untuk Penghapusan Pekerja Anak 2022



Memahami Masalah Pekerja Anak

Ada beberapa persepsi yang bertentangan terkait pekerja anak di Indonesia, dan hal ini tercermin dalam istilah bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengekspresikan konsep tersebut. Keputusan tentang Pekerja Anak tahun 1987 menggunakan istilah "anak yang terpaksa bekerja". Akan tetapi, hal ini menyiratkan bahwa anak umumnya terlibat dalam perburuhan, jika tidak sepenuhnya, akibat kemiskinan. Meskipun kemiskinan tidak diragukan lagi merupakan inti dari permasalahan tersebut, namun dengan melihat lebih dekat, akan terlihat serangkaian penyebab yang lebih rumit, termasuk ketidakpuasan terhadap pendidikan dan perubahan gaya hidup di antara faktor-faktor lain yang memengaruhinya.

Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan banyak pihak, pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lain, disepakati untuk menggunakan istilah "pekerja anak." Namun istilah ini juga tidak dapat mengambil konsep dari perburuhan anak seperti yang diinginkan ILO, yang mendefinisikannya sebagai pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi dan martabat anak, serta merusak perkembangan fisik dan mental mereka. Sebagian dari masalahnya adalah adanya keyakinan yang mendalam di Indonesia bahwa bekerja merupakan hal yang baik untuk dilakukan anak-anak, dan merupakan bagian dari sosialisasi normal mereka.

Menyadari perlunya mempromosikan pemahaman yang lebih baik di kalangan pemangku kepentingan, pemerintah Indonesia segera membentuk Komite Pengarah Nasional (KPN) setelah Nota Kesepahaman ditandatangani. KPN yang terdiri dari perwakilan tripartit, yaitu LSM, media, dan akademisi ini bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi komitmen Indonesia dalam menghapus perburuhan anak. Di samping itu, komite ini ditugaskan untuk memastikan bahwa semua upaya sesuai dengan cita-cita negara: melindungi semua masyarakat dan tanah Indonesia; untuk meningkatkan kesejahteraan publik; untuk mendidik masyarakat; dan untuk berpartisipasi dalam pembentukan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian Utama

1992 – 1996: Awal Cerita -

Meningkatkan Kesadaran tentang Pekerja Anak

Indikasi nyata pertama tentang skala permasalahan muncul pada tahun 1993, ketika ILO memperkirakan terdapat tiga juta pekerja anak usia 10–14 tahun di Indonesia.ⁱⁱ Di wilayah Asia Pasifik, hanya Nepal dan Filipina yang memiliki jumlah pekerja anak lebih banyak.ⁱⁱⁱ

Dua tahun kemudian, laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka dua juta pekerja anak usia 10–14 tahun, atau 9 persen dari jumlah total anak dalam kelompok usia tersebut;^{iv} jumlah ini hanya sepertiga dari jumlah aktual pekerja anak pada saat itu.

Menyadari bahwa peningkatan kesadaran sangatlah penting, ILO bersama dengan pemerintah dan LSM, menganjurkan upaya melalui berbagai saluran—pengusaha, sekolah, keluarga, komunitas, dan media—untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan mengenai masalah pekerja anak, khususnya upaya untuk menghapus kesalahpahaman bahwa anak bekerja adalah hal yang normal dan bahkan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Mitra tripartit utama—serikat pekerja dan asosiasi pengusaha—menghimbau anggota mereka untuk menghentikan praktik perburuan anak, sementara pemerintah mulai melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan lebih ketat.

Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan selama periode ini adalah pelatihan DME (Desain, Manajemen dan Evaluasi) ILO, yang menunjukkan pemangku kepentingan tentang cara mendesain, mengelola, dan mengevaluasi rencana aksi yang ditargetkan untuk menghapuskan perburuan anak

Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan selama periode ini adalah pelatihan DME (Desain, Manajemen dan Evaluasi) ILO, yang menunjukkan pemangku kepentingan tentang cara mendesain, mengelola, dan mengevaluasi rencana aksi yang ditargetkan untuk menghapuskan perburuan anak.



Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Menyadari bahwa Indonesia perlu menjangkau lebih banyak masyarakat dalam pendidikan demi mendukung perkembangan pesatnya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk mengeluarkan negara ini dari kemiskinan, pemerintah meluncurkan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 1994. Sembilan tahun dianggap sebagai waktu minimal untuk membekali kaum muda dengan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan kehidupan yang layak, dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi. Bagi anak-anak yang putus sekolah sebelum mendapatkan keterampilan ini, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak.

Akibatnya, lebih dari 200 peserta pelatihan dari organisasi tripartit, LSM, dan universitas melanjutkan mengatasi perburuhan anak melalui program aksi yang bervariasi dari pengembangan lembaga hingga aksi langsung untuk melindungi anak-anak yang berisiko, dengan menarik mereka dari pekerjaannya atau memberikan pendidikan dan pelatihan dasar. KPN memberikan dukungan dan umpan balik untuk semua kegiatan tersebut.

Menteri Kesehatan saat ini, Nafsiah Mboi, dan akademisi lainnya seperti Prof. Irwanto dari Universitas Atmajaya telah melakukan kajian tentang pekerja anak dan keterlibatan pemangku kepentingan pada periode ini. Kajian ini memberikan rekomendasi tentang pentingnya peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang pekerja anak dan permasalahannya sebagai jawaban terhadap ketidakpahaman mereka.

Hampir semua program layanan langsung berorientasi ke arah pendidikan. Dari awal, **pendidikan telah menjadi landasan atas respons Indonesia**

terhadap perburuhan anak. Bersama ILO, pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan menyadari bahwa pendidikan harus dapat lebih mudah diakses dan lebih relevan karena hal ini dapat menarik anak-anak menjauh dari perburuhan secara efektif, atau mencegah mereka menjadi pekerja. Para mitra ini bekerja dengan anak-anak, orangtua, pengusaha, guru, dan pemimpin komunitas pada rangkaian program pelatihan perbaikan (*remedial*) dan keterampilan untuk anak-anak putus sekolah, serta rujukan langsung ke lembaga pendidikan formal (sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas). Para guru memperoleh manfaat dari peningkatan kapasitas dan materi yang lebih baik dikembangkan untuk pendidikan non-formal. Yang juga sangat penting adalah intervensi yang mendukung penggunaan program pendidikan kesetaraan non-formal pemerintah sehingga memungkinkan anak-anak untuk "mengejar" tugas sekolah yang tertinggal dan mengambil ujian kelulusan sekolah.

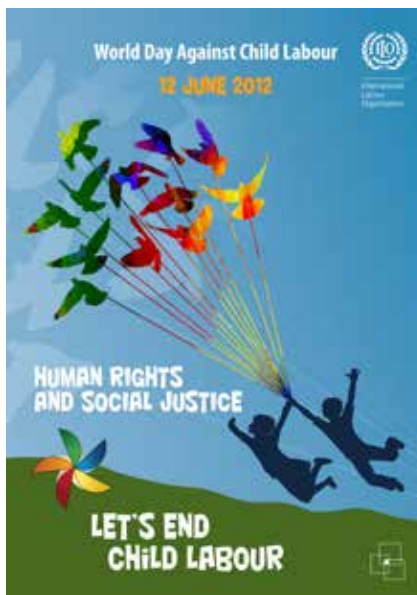
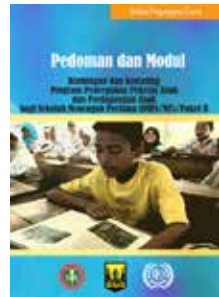
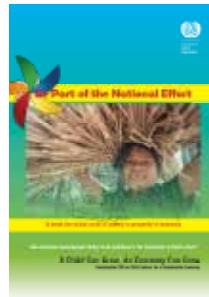
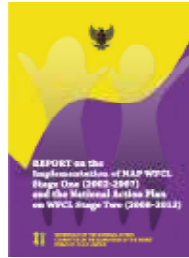
Meskipun intervensi berbasis pendidikan mulai menunjukkan hasil, namun inisiatif lain kurang menunjukkan hasil yang baik. Pemerintah dan ILO bekerja sama pada program bantuan tunai bersyarat kepada para orangtua untuk menggantikan pendapatan yang dihasilkan oleh anak mereka. Meskipun menjadi favorit di antara para penerima bantuan, program ini dianggap tidak efektif ketika diluncurkan karena para orangtua mengakui bahwa anak mereka terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya demi mendapatkan uang bantuan tersebut.

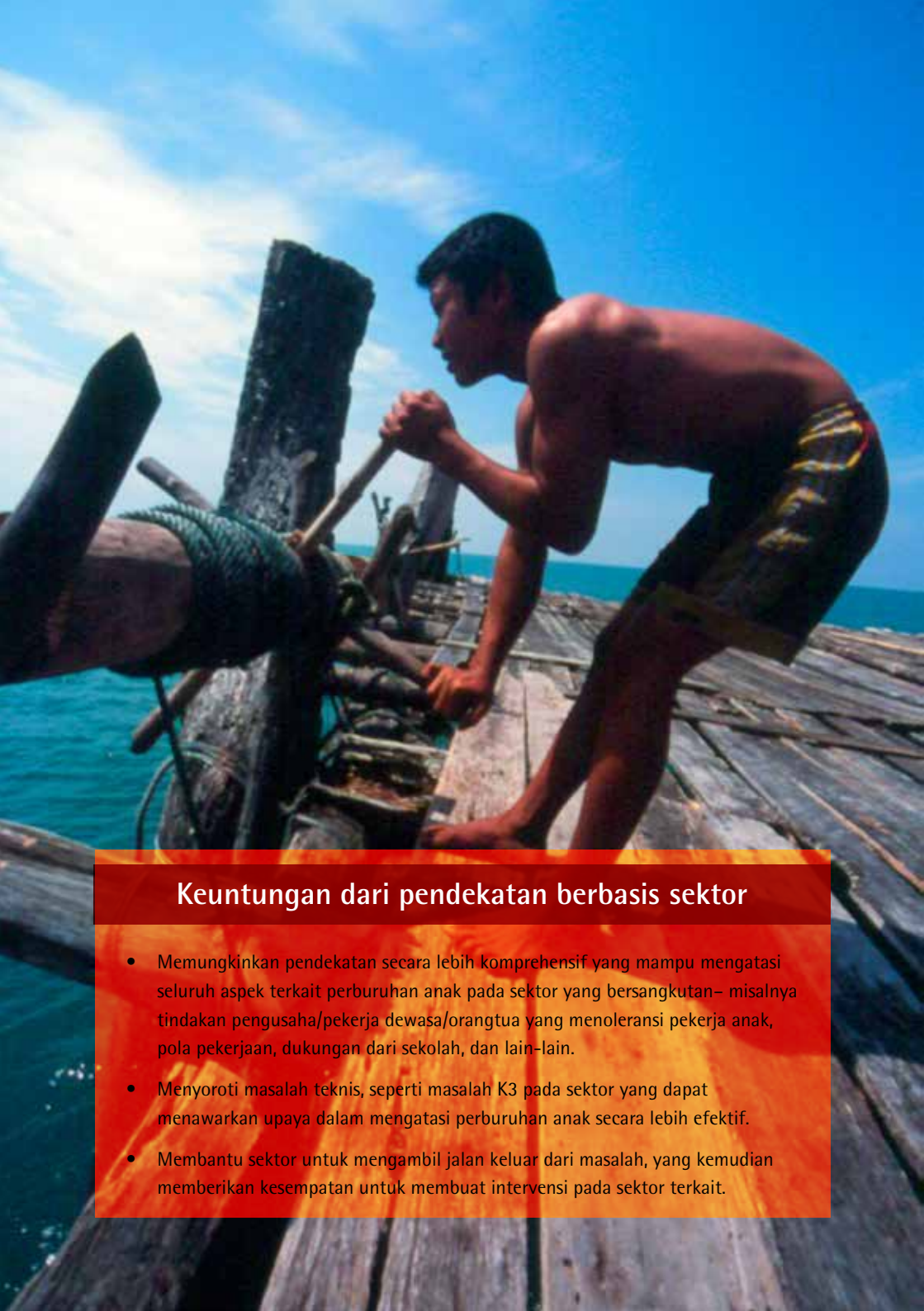
Inisiatif utama pemerintah pada saat ini adalah program "Desa Tertinggal" yang diluncurkan oleh Instruksi Presiden pada tahun 1994 untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Pemerintah Indonesia dan ILO, menyadari ini adalah kesempatan yang strategis untuk mengintegrasikan permasalahan perburuhan anak dalam agenda pengembangan, bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan hak-hak anak dalam intervensi tingkat komunitas dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak berbahaya dari pekerja anak dan meningkatkan akses ke pendidikan.^v

Ringkasan

	Perkembangan Kebijakan	Penguatan Kapasitas dan kelembagaan	Intervensi Langsung
1992-1996	1992: Penandatangan Nota Kesepahaman. 1993: Deklarasi Penghapusan Pekerja Anak. 1993: Pembentukan Komite Pengarah Nasional untuk IPEC.	ILO memperkenalkan pelatihan DME untuk program aksi pekerja anak.	Pendidikan: program remedial, pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas untuk guru dan mengembangkan sumberdaya untuk pendidikan non-formal.







Keuntungan dari pendekatan berbasis sektor

- Memungkinkan pendekatan secara lebih komprehensif yang mampu mengatasi seluruh aspek terkait perburuan anak pada sektor yang bersangkutan– misalnya tindakan pengusaha/pekerja dewasa/orangtua yang menoleransi pekerja anak, pola pekerjaan, dukungan dari sekolah, dan lain-lain.
- Menyoroti masalah teknis, seperti masalah K3 pada sektor yang dapat menawarkan upaya dalam mengatasi perburuan anak secara lebih efektif.
- Membantu sektor untuk mengambil jalan keluar dari masalah, yang kemudian memberikan kesempatan untuk membuat intervensi pada sektor terkait.

1997 - 2001:

Menuju Pendekatan Berbasis Sektor

Menteri Tenaga Kerja pada saat itu, Cosmas Batubara menandatangani Nota Kesepahaman kedua tentang IPEC pada tahun 1997 sebagai langkah signifikan menuju peningkatan kondisi anak Indonesia, dan kemajuan yang cukup pesat mulai terlihat pada periode ini. Pemerintah Indonesia dan ILO bekerja keras untuk mengonsolidasi langkah strategis dari lima tahun sebelumnya—advokasi untuk perubahan politik serta intervensi langsung pada wilayah yang berisiko dan pendidikan—serta memperkenalkan pengawasan tempat kerja sebagai pendekatan baru untuk menghapus pekerja anak. Yang terpenting, Indonesia dan ILO mengambil langkah yang signifikan atas pengarusutamaan masalah pekerja anak pada inti dari permasalahan, yaitu kemiskinan.

ILO dan pemerintah Indonesia juga menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan selama periode ini. **Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia dan ILO mendorong pengembangan Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK).** Didirikan sebagai bagian dari komitmen ILO untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada, anggota JARAK mulai menghasilkan program aksi untuk menyoroti hak-hak anak dan memerangi pekerja anak.

Di saat yang bersamaan, ILO dan Indonesia terus membangun kapasitas pemangku kepentingan pada Kementerian Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha melalui pelatihan DME, tidak hanya di Jakarta namun juga di wilayah lain dengan jumlah pekerja anak yang tinggi, termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, sejumlah inspektur pengawasan perburuhan dilatih secara khusus untuk mengatasi masalah yang meningkat tajam.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), melatih guru-guru di seluruh Indonesia untuk mencegah pekerja anak secara aktif dengan memperkuat materi dan metode pengajaran.

Untuk mendukung usaha ini, guna meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, ILO dan pemerintah Indonesia memublikasikan serangkaian penelitian dan evaluasi tentang pekerja anak di beberapa sektor. Publikasi ini berfungsi untuk memperkaya dasar pengetahuan tentang pekerja anak, menggerakkan lebih banyak orang untuk merespons masalah, dan membuka jalan pendekatan berbasis sektor yang lebih terarah.

Untuk mendukung usaha ini, guna meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, ILO dan pemerintah Indonesia memublikasikan serangkaian penelitian dan evaluasi tentang pekerja anak di beberapa sektor.

Satu dasawarsa kemudian, serangkaian tindakan tegas diambil pada sektor kebijakan. Salah satu tonggak yang paling penting adalah ayat dari **Undang-undang No. 20 Tahun 1999 untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 138** mengenai Usia Minimum untuk Bekerja dan mengatur usia 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja di Indonesia.

Tidak lama setelah itu, Indonesia meratifikasi **Konvensi ILO No. 182** mengenai Larangan dan Tindakan Langsung untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui **Undang-Undang No. 1 Tahun 2000**. Ini membuat Indonesia sebagai negara pertama di wilayah Asia Pasifik yang meratifikasi semua Konvensi Pokok ILO, yang mencakup kebebasan berserikat, diskriminasi, kerja paksa dan pekerja anak. Indonesia menindaklanjuti undang-undang ini pada tahun 2001 dengan membentuk **Komite Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**, yang bertugas untuk mengembangkan program dan proyek nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lain.

Dengan merefleksikan desakan baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, aksi langsung mengambil pendekatan berbasis sektor, yang memungkinkan adanya intervensi terarah yang jauh lebih akurat di sektor tertentu, di mana banyak terdapat pekerja anak eksploitatif. Di tahun 1999, Kantor Regional Asia Pasifik ILO meluncurkan dua program yang didanai oleh Departemen Perburuhan AS (*US Department of Labor* (USDOL)), untuk menghapus pekerja anak pada sektor perikanan dan alas kaki di Indonesia. Proyek ini memelopori pengawasan tempat kerja dalam mengatasi





pekerja anak. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meneruskannya setelah proyek selesai. Hal ini menjadi sebuah cerminan dari komitmen dalam mengentaskan pekerja anak. Pada tahun 2001, ILO memulai proyek untuk mengatasi perdagangan untuk seks komersial, sebuah intervensi yang juga menyoroti tujuan dari pekerjaan layak bagi semua.

Ringkasan

	Perkembangan Kebijakan	Penguatan Kapasitas dan kelembagaan	Intervensi Langsung
1997-2001	1997: Penandatangan Nota Kesepahaman yang kedua. 1999: Ratifikasi Konvensi ILO No. 139 tentang Usia Minimum Anak-Boleh Bekerja. 2000: Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 2001: Pembentukan Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	1998: JARAK (jaringan LSM tentang pekerja anak) dibentuk. Peningkatan kapasitas kepada pengawas tenaga kerja, serikat pekerja, pengusaha, dan sebagainya.	Advokasi publikasi terkait pekerja anak. Program aksi untuk pengarusutamaan pekerja anak, Program aksi tentang pengarusutamaan penghapusan pekerja anak ke dalam program nasional pengurangan kemiskinan. Pendekatan sektoral: Program di pertanian, perikanan dan manufaktur.



K3 Membuka Pintu Bagi Intervensi untuk Menghapus Pekerja Anak

Memiliki pengalaman panjang dalam meningkatkan kesehatan dan keamanan tempat kerja di Indonesia, ILO mengadakan penelitian tentang korelasi antara peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan produktivitas dalam lokakarya pembuatan alas kaki informal di Cibaduyut, Bandung.

Hasilnya, disertai dengan praktik secara praktis pada lokakarya model, mampu meyakinkan pemilik bisnis bahwa kondisi dan praktik kerja yang lebih sehat dan aman membuat pemikiran bisnis menjadi baik, dan banyak yang kemudian mulai mengadopsi dan menerapkan standar K3 di bengkel-bengkel mereka.

Dengan menjadikan pekerjaan tidak terlalu berbahaya, pemilik bengkel mendapatkan peningkatan produktivitas yang bahkan lebih tinggi setelah melakukan usaha untuk meningkatkan kapasitas pekerja muda dengan melatih mereka untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif—dan penghasilan yang lebih tinggi—seperti mendesain dan menggambar pola alas kaki.

Setelah komunitas mampu mencari solusi atas masalah K3, intervensi pada penghapusan pekerja anak menjadi lebih mudah diterima.

2002 – 2006:

Meningkatkan Kesempatan Hidup Anak-anak



Indonesia dan ILO terus memperluas jangkauan intervensi berbasis sektor, dan mulai menangani pekerja anak pada rumah tangga, yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penelitian di tahun 2002 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 700.000 anak, di mana mayoritas perempuan menjadi pekerja rumah tangga, biasanya bekerja berjam-jam dan terisolasi dari anak-anak seusia mereka.^{vii}

Langkah yang signifikan dilakukan pada pengembangan kebijakan, di mana Indonesia melakukan tindakan serius untuk memenuhi Konvensi ILO No. 138 dan 182, termasuk pengembangan **Rencana**

Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN BPTA). Dengan menargetkan Indonesia bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2022, rencana terikat waktu ini selanjutnya akan divalidasi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya, serta pembentukan lembaga pendukung dalam pemerintahan.^{viii}

Dengan dukungan ILO, pemerintah lokal di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam mengembangkan kebijakan, komite, dan rencana aksi tentang pekerja anak. Beberapa provinsi melangkah lebih jauh dengan mengalokasikan pembiayaan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sedangkan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang mendeklarasikan daerahnya sebagai **Zona Bebas Pekerja Anak**, menjamin bahwa pada tahun 2022 daerah tersebut harus terbebas dari pekerja anak.

Langkah yang signifikan dilakukan pada pengembangan kebijakan, di mana Indonesia melakukan tindakan serius untuk memenuhi Konvensi ILO No. 138 dan 182, termasuk pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN BPTA). Dengan menargetkan Indonesia bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2022.

Peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan terus berlanjut, dengan berfokus pada serikat pekerja, asosiasi guru, pengusaha, pejabat pemerintah, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil. Sedangkan inisiatif bersama oleh pemerintah Indonesia dan ILO dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan keterampilan hidup dan program magang, sangat signifikan dalam memperkuat usaha untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.



Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan di antara para guru dan anggota komunitas lain memberikan pengaruh, yakni hampir seluruh program yang menyertakan pengawasan berbasis sekolah berhasil meningkatkan kehadiran para pekerja anak di sekolah, mengurangi jumlah jam kerja mereka, dan dalam beberapa kasus, berhasil menarik mereka dari pekerjaan sepenuhnya.

Sementara itu, pendekatan baru berupaya untuk meningkatkan pilihan yang tersedia bagi anak-anak yang lebih tua (berusia 15–17 tahun) dengan memberikan mereka kesempatan bekerja secara lebih aman. Indonesia dan ILO menyadari bahwa, bagi beberapa anak ini—yang telah mencapai usia minimum yang sah untuk bekerja—meningkatkan kondisi bekerja mungkin merupakan cara yang efektif untuk menarik mereka dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dibandingkan menarik mereka dari tempat kerja.

Pada pusat pabrik alas kaki di Cibaduyut di Jawa Barat, kelompok komunitas, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lain yang peduli dengan pekerja anak melanjutkan upaya untuk mencegah orang dewasa mempekerjakan anak-anak. Proses produksi kerap kali melibatkan bahan kimia, proses, dan peralatan berbahaya. Anak-anak, yang tubuh dan pikirannya masih dalam tahap berkembang, berisiko mengalami gangguan kesehatan jangka panjang akibat paparan dari bahan berbahaya tersebut.

Anak-anak yang terlantar, yatim piatu, atau yang terkena bencana alam atau berada di daerah konflik adalah anak-anak yang paling rentan terhadap





bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Menjelang akhir periode ini, ILO dan pemerintah Indonesia meluncurkan program untuk mendukung korban kaum muda dari tsunami Aceh tahun 2004, serta anak-anak yang orangtuanya terlibat dalam konflik bersenjata atau politik.

Di tahun 2005, pemerintah Indonesia dan ILO telah menarik atau mencegah ribuan anak-anak memasuki bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sementara itu, pendekatan baru berupaya untuk meningkatkan pilihan yang tersedia bagi anak-anak yang lebih tua (berusia 15-17 tahun) dengan memberikan mereka kesempatan bekerja secara lebih aman. Indonesia dan ILO menyadari bahwa, bagi beberapa anak ini—yang telah mencapai usia minimum yang sah untuk bekerja—meningkatkan kondisi bekerja mungkin merupakan cara yang efektif untuk menarik mereka dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dibandingkan menarik mereka dari tempat kerja.

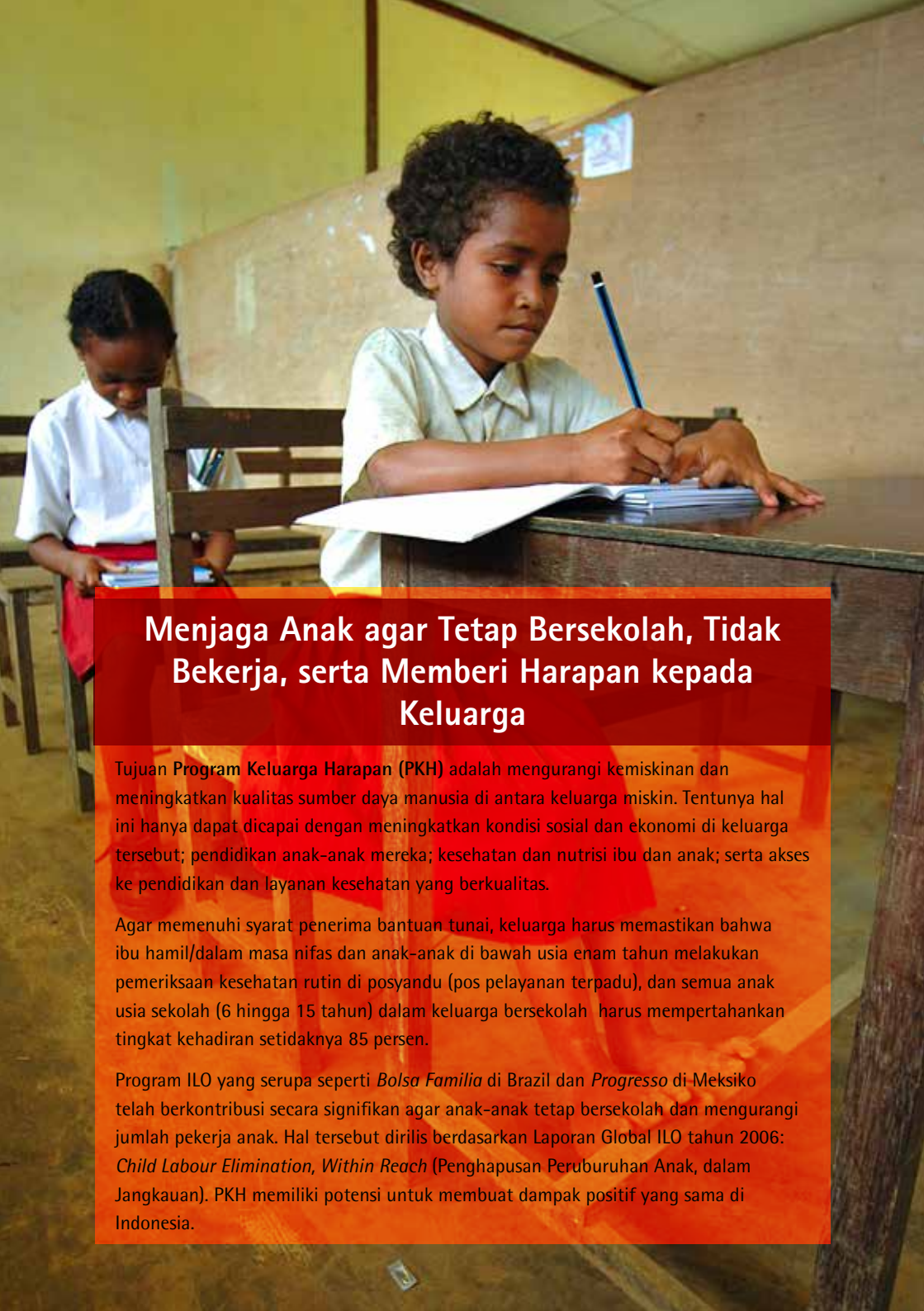
Jumlah Anak yang Ditarik atau Dicegah dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), 2002-2006

Sektor	Ditarik	Dicegah	Total
Perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial	144	4.935	5.079
Perdagangan narkoba	476	8.128	8.604
Pekerja rumah tangga	2	1.321	1.323
Pekerja alas kaki	1.694	6.080	7.774
Penangkapan ikan	671	6.125	6.796
Pertambangan emas	411	1.987	2.398
Penanggulangan/pencegahan di wilayah bencana alam	-	6.119	6.119
Total	3.398	34.695	38.093

Source: ILO-IPEC and MOMT beneficiaries 2002 - 2006

Ringkasan

	Perkembangan Kebijakan	Penguatan Kapasitas dan kelembagaan	Intervensi Langsung
2002-2006	2002: - Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. - Kabupaten Kutai Kartanegara mendeklarasikan sebagai Zona Bebas Pekerja Anak—pertama di dunia (dilaporkan pada Konferensi Perburuhan Internasional 2008). 2003: - Keputusan Menteri No. 235 tentang Pekerjaan yang membahayakan bagi moral, keselamatan dan kesehatan anak-anak - UU Tenaga Kerja (mengadopsi sebagian dari Konvensi ILO 182) - UU Sistem Pendidikan Nasional (mendefinisikan pelatihan keterampilan dimana menjadi cantolan program pra-vokasional dan vokasional).	Peningkatan kapasitas diperluas bagi PGRI, pekerja media/jurnalis, dan masyarakat umum. Serikat pekerja dan pengusaha melaksanakan program untuk penghapusan pekerja anak.	Program untuk penghapusan pekerja rumah tangga anak. Pendidikan kecakapan hidup dan program magang untuk mempersiapkan anak mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendukung penghapusan BPTA. Kondisi kerja yang aman bagi anak-anak usia 15-17 tahun.



Menjaga Anak agar Tetap Bersekolah, Tidak Bekerja, serta Memberi Harapan kepada Keluarga

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di antara keluarga miskin. Tentunya hal ini hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di keluarga tersebut; pendidikan anak-anak mereka; kesehatan dan nutrisi ibu dan anak; serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Agar memenuhi syarat penerima bantuan tunai, keluarga harus memastikan bahwa ibu hamil/dalam masa nifas dan anak-anak di bawah usia enam tahun melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di posyandu (pos pelayanan terpadu), dan semua anak usia sekolah (6 hingga 15 tahun) dalam keluarga bersekolah harus mempertahankan tingkat kehadiran setidaknya 85 persen.

Program ILO yang serupa seperti *Bolsa Familia* di Brazil dan *Progreso* di Meksiko telah berkontribusi secara signifikan agar anak-anak tetap bersekolah dan mengurangi jumlah pekerja anak. Hal tersebut dirilis berdasarkan Laporan Global ILO tahun 2006: *Child Labour Elimination, Within Reach* (Penghapusan Peruburuhan Anak, dalam Jangkauan). PKH memiliki potensi untuk membuat dampak positif yang sama di Indonesia.

2007 - 2011:

Mengatasi Pekerja Anak Melalui Pendidikan



Sejak awal, upaya untuk menghapus pekerja anak terkait erat dengan pendidikan. Menurut Abdul Latif, Menteri Tenaga Kerja tahun 1993-1998, salah satu inti tujuan dari penandatanganan Nota kesepahaman IPEC awal tahun 1992 adalah untuk memperluas akses ke pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dan untuk

memperkuat partisipasi Indonesia dalam upaya global untuk meningkatkan kualitas pendidikan. **Pemerintah Indonesia juga melanjutkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai berjalan pada 2005.** Skema ini memindahkan biaya sekolah melalui pemberian bantuan ke sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa.

Target tersebut tercermin pada kebijakan pekerja anak dan pengembangan program selama periode lima tahun, dengan penekanan pada perluasan akses ke pendidikan sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak. **Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah inisiatif pengentasan kemiskinan yang mengharuskan penerima dana bantuan tunai tetap menyekolahkan anak mereka sampai menyelesaikan pendidikan dasar.** Jika ada penerima dana bantuan yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka ia akan dikeluarkan dari program.

Program PKH secara eksplisit mengakui keterkaitan antara kemiskinan dan pekerja anak. Seringkali anak-anak dari keluarga miskin ini dipaksa bekerja sejak usia dini, sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran di sekolah dan putus sekolah. Anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar

memiliki kesempatan sangat terbatas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal saat mereka beranjak dewasa.^{ix} Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Penyertaan pekerja anak sebagai salah satu indikator pencapaian program adalah tanda yang jelas bahwa masalah pekerja anak telah berhasil diurusutamakan ke dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini juga menandai terpenuhinya tujuan awal yang ditargetkan pada saat berdirinya program penghapusan pekerja anak oleh Indonesia dan ILO.

Untuk memperkuat inisiatif PKH ini, **Indonesia dan ILO meluncurkan Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung PKH (PPA-PKH) dan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2008.**^x Dengan didukung pendanaan dari pemerintah sebesar USD 10 juta, program ini telah berhasil menarik lebih dari 10.000 anak dari pekerjaan berbahaya; dan lebih dari 11.000 pekerja anak dari keluarga PKH mendapatkan manfaat dari program pendidikan transisi untuk membantu mereka masuk ke sistem pendidikan; sementara hampir 5.000 anak



jalanannya mendapatkan beasiswa serta program pelatihan kecakapan hidup. Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang dua program tersebut hingga tahun 2015, dan telah mengalokasikan USD 10 juta lagi untuk menarik anak-anak dari pekerjaan berbahaya pada tahun 2012.

Dengan menggunakan gabungan dari pendekatan yang terbukti dan strategi baru, Indonesia dan ILO terus meningkatkan kualitas dan berbagai intervensi pendidikan untuk menarik anak-anak dari pekerjaan berbahaya dan meningkatkan prospek mereka untuk mencari pekerjaan yang layak. **Pelatihan pravokasional dan kecakapan hidup diberikan melalui sekolah menengah pertama untuk mempersiapkan anak-anak menjalani transisi dari sekolah ke dunia kerja dengan mengembangkan kecakapan yang berharga pada saat menyelesaikan pendidikan dasar mereka.** Anak-anak yang lebih tua (15-17 tahun) memiliki akses ke pelatihan pada berbagai keterampilan melalui sekolah menengah kejuruan, yang mampu meningkatkan kesempatan bersaing mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik di sektor formal. ILO juga telah memodifikasi dan meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan membuatnya tersedia bagi beragam peserta, termasuk para orangtua dari pekerja anak.

Kecakapan Hidup dan Pelatihan K3

Salah satu karakteristik yang unik dari program pelatihan pravokasional dan vokasional yang dikembangkan oleh ILO dan Indonesia adalah pelatihan kecakapan hidup, yang tertanam dalam keseluruhan program. Kecakapan hidup didefinisikan secara luas sebagai rangkaian kecakapan pribadi, sosial, dan intelektual yang diperlukan kaum muda saat memasuki dunia kerja, termasuk kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, bernegosiasi, dan berkomunikasi.

Karakteristik unik yang kedua dari program ini adalah ketentuan dari pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga anak-anak memiliki kesadaran yang lebih baik akan potensi bahaya di tempat kerja, hak-hak mereka, dan cara melindungi diri mereka saat memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Keterampilan hidup dan pelatihan K3 membantu memberdayakan para kaum muda yang putus sekolah untuk mencari pekerjaan yang lebih aman dengan kondisi yang lebih baik pada saat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.



Penanggulangan pekerja anak secara efektif memerlukan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel bagi anak-anak yang putus sekolah atau bekerja. Selama tahun pertama bekerja sama, ILO dan Indonesia berusaha mendapatkannya dengan meningkatkan akses ke pendidikan kesetaraan melalui sektor non-formal. Akan tetapi, selama sepuluh tahun terakhir, fokusnya telah beralih dengan memberikan kesempatan tersebut melalui sektor formal.

Meskipun sebagian besar desa di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah dasar, jumlah sekolah menengah masih sedikit atau jauh lebih sedikit, terutama pada area pedesaan yang terpencil. **Program SMP Satu Atap dirancang untuk memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan menengah pertama bahkan di tempat di mana sekolah tersebut tidak tersedia**, dengan menugaskan guru-guru dan menggunakan fasilitas sekolah dasar yang ada. Program **SMP Terbuka** juga menawarkan layanan yang sama melalui fasilitas komunitas.

Usaha untuk menarik lebih banyak pekerja anak dan mengembalikan mereka ke pendidikan dengan memperluas akses ke pendidikan berkualitas sedang dilakukan. **ILO dengan dukungan pemerintah Belanda, meluncurkan Proyek Inovatif tentang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (EAST)** selama empat tahun di bagian timur Indonesia dan Aceh. Proyek ini dikembangkan sebagai jawaban dari kebutuhan pentingnya **keterkaitan antara pekerja anak dan tenaga kerja muda**. Tujuan utama pada tahun 2010, ILO meluncurkan proyek baru dengan

dukungan dari pemerintah Belanda, untuk memerangi pekerja anak melalui pendidikan. Proyek ini bertujuan untuk mencegah anak-anak dari putus sekolah menjadi pekerja anak dengan memberikan pendidikan dasar yang berkualitas, memperkuat kualitas pendidikan keterampilan bagi kaum muda untuk meningkatkan kesempatan bekerja dan akses ke pekerjaan yang layak.

Proyek ini bertujuan untuk mencegah anak-anak dari putus sekolah menjadi pekerja anak dengan memberikan pendidikan dasar yang berkualitas, memperkuat kualitas pendidikan keterampilan bagi kaum muda untuk meningkatkan kesempatan bekerja dan akses ke pekerjaan yang layak.

Belajar dari pengalaman Program Terikat Waktu fase kedua dan EAST, pada tahun 2010 ILO meluncurkan proyek baru tentang Penghapusan Pekerja Anak melalui Pendidikan yang kembali didanai oleh Pemerintah Belanda. Proyek ini melanjutkan pekerjaan dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan BPTA dengan belajar dari pengalaman intervensi-intervensi yang sukses di Indonesia dan negara lain, mengembangkan kapasitas para mitra di sektor pendidikan, masyarakat umum dan lainnya agar secara aktif terlibat mengarusutamakan masalah pekerja anak ke dalam rencana pembuatan kebijakan di sektor pendidikan.

Penerima proyek ini termasuk anak-anak jalanan dan anak-anak yang bekerja di lokasi pembuangan sampah di Sulawesi Selatan. Selain memberikan akses yang lebih baik pada kesempatan pendidikan untuk pekerja anak dan anak-anak yang berisiko, proyek tersebut telah mendukung sejumlah kampanye peningkatan kesadaran dan advokasi, termasuk film pendek dan rekaman video yang dibuat oleh anak-anak yang terlibat dalam beberapa bentuk pekerjaan terburuk untuk anak: pemulung, eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga, dan pekerja pabrik. Film ini adalah salah satu alat advokasi yang kuat dengan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, kesusahan, perjalanan, dan harapan dari para pekerja anak. Melalui proyek ini, ILO juga mendukung pembuatan Peta Jalan untuk Menghapus Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2022.

Tindakan lokal menghapuskan pekerja anak dikuatkan oleh **Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 tentang Panduan Pembentukan**

Komite Aksi Regional, Pembentukan Rencana Aksi Regional, dan Pemberdayaan Komunitas untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. ILO mendukung

pengembangan peraturan ini, untuk memperkuat otoritas pemerintah lokal dalam bertindak dan mengalokasikan pendanaan lokal sebagai upaya menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, serta memfasilitasi pemberdayaan komunitas dan berpartisipasi dalam upaya untuk mencegah dan menarik anak-anak dari pekerja anak. ILO juga telah mendukung pembentukan komite lokal di sejumlah provinsi dan kabupaten.

Meskipun tetap ada tantangan, seperti bagaimana komite harus berkoordinasi dengan lembaga lain seperti pengawas ketenagakerjaan, lembaga peradilan, dan kepolisian yang melaporkan langsung ke otoritas pusat, peraturan memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat tindakan lokal untuk memerangi pekerja anak.

Sejumlah program dan kegiatan peningkatan kapasitas yang melibatkan ribuan partisipan yang dilaksanakan oleh ILO bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, telah memainkan bagian penting dalam mendukung proyek aksi langsung pada tingkat lokal dan pusat. Perlu dicatat bahwa Pelatihan DME, yang dikenalkan pertama kali di Indonesia hampir 20 tahun lalu, terus dipergunakan secara luas oleh JARAK dengan dukungan dari Uni Eropa.

Di saat yang bersamaan, **serikat pekerja, dengan dukungan dari ILO dan pemangku kepentingan lain, telah memainkan peran penting dalam menghapus pekerja anak melalui berbagai program dan proyek.** ILO juga



Program SMP Satu Atap dirancang untuk memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan menengah pertama bahkan di tempat di mana sekolah tersebut tidak tersedia, dengan menugaskan guru-guru dan menggunakan fasilitas sekolah dasar yang ada.



telah mendorong pengusaha, melalui asosiasi mereka, untuk berkampanye melawan pekerja anak di setiap kesempatan. Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, adalah salah satu upaya penting untuk menyosialisasikan permasalahan pekerja anak. Hari Dunia Menentang Pekerja Anak memilih tema yang berbeda setiap tahunnya sehingga setiap negara yang berpartisipasi, termasuk Indonesia, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah, perbedaan kategori pekerja anak dan mendorong masyarakat umum untuk menghapuskan pekerja anak.

Pada 2009, ILO dengan dukungan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Pekerja Anak. Survei ini adalah sub-contoh dan terintegrasi di Survei Nasional Tenaga



Kerja (Sakernas) 2009. Survei mengambil hasil dari pendataan pada tahun 2008, dari 248 kabupaten terpilih dan 760 blok sensus. Survei ini adalah survei pertama pemerintah tentang pekerja anak dan memberikan data yang terpercaya tentang statistik pekerja anak termasuk situasi dan kondisi di setiap kabupaten/provinsi.

Prestasi yang dicapai sangat membanggakan. Pada periode 2007-2011, sepuluh ribuan anak telah memperoleh manfaat dari berbagai program untuk menarik pekerja anak atau mencegah mereka memasuki pekerjaan yang berbahaya. Beberapa telah kembali ke sekolah, sementara yang lain bekerja di sektor yang lebih aman dengan kondisi tempat kerja yang lebih baik.

Sementara itu, kesadaran akan masalah terus berkembang: ribuan orang dewasa, termasuk banyak orangtua, mengetahui bahwa mereka tidak hanya mengetahui lebih banyak tentang bahaya pekerja anak, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan/atau penghasilan setelah mengambil bagian dari program aksi yang dilaksanakan ILO dan mitranya.^{xi}

Jumlah Anak yang Ditarik dan Dicegah dari Pekerja Anak

Sektor	Ditarik			Dicegah			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Perkebunan	1.356	1.304	2.660	3.115	2.796	5.911	8.571
Perdagangan orang	26	395	421	1.886	2.197	4.083	4.504
PRTA	193	1.034	1.227	1.784	2.648	4.432	5.659
Anak jalanan	157	77	234	291	442	733	967
Total	1.732	2.810	4.542	7.076	8.083	15.159	19.701

Sumber: ILO-IPEC Program Terikat Waktu fase 2 – Database untuk Laporan Pemantauan 2007-2011

Ringkasan

	Perkembangan Kebijakan	Penguatan Kapasitas dan kelembagaan	Intervensi Langsung
2007-2012	2007: Program Keluarga Harapan diluncurkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan mengarusutamakan permasalahan pekerja anak kedalamnya.	Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha melaksanakan program/proyek untuk penghapusan pekerja anak.	Program untuk menarik dan mencegah anak dari pekerja rumah tangga anak, pekerja perkebunan, perdagangan orang dan anak-anak yang bekerja di jalan.
	2008: Program menarik pekerja anak untuk mendukung PKH (PPA – PKH); Program Kesejahteraan Sosial Anak		Meningkatkan akses ke pendidikan formal dan non- formal termasuk pelatihan keterampilan.
	2009: Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Komite Aksi Lokal, Penyusunan Rencana Aksi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedang berjalan: Peta Jalan untuk Penghapusan Pekerja Anak 2022		Advokasi intensif melalui suara-suara pekerja anak.

Menggunakan Pendidikan untuk Memisahkan Anak-anak dari Pekerja Anak – Dalam Angka

Pekerja Anak/Kembali ke Sekolah

- 2.566 (54% perempuan) pemangku kepentingan di bidang pendidikan diberi pelatihan tentang pendidikan kecakapan hidup ('3R'), berkampanye, dan advokasi ('SCREAM') dan pendidikan inklusif.
- 4.154 pekerja anak dan 12.046 anak-anak bersekolah tetapi berisiko putus sekolah menerima pendidikan tingkat menengah pertama dan/atau kursus pendidikan non-formal dan kegiatan ekstrakurikuler/rekreasi berdasarkan SCREAM & 3R.



Kecakapan Hidup

- 470 guru dilatih.
- 11.700 anak sekolah menengah pertama memperoleh manfaat pelatihan kecakapan hidup.



Bimbingan Karier dan Pendidikan

Sampai dengan Februari 2011:

- 2.599 guru dari 2.876 guru sekolah menengah pertama, atas, kejuruan yang ditargetkan (57% perempuan- 43% laki-laki) telah diberi pelatihan tentang program BKP di beberapa provinsi yang menjadi target ILO-EAST.
- 79.148 siswa (52% perempuan) dari target 117.554 telah mendapatkan konseling dari guru melalui sesi konseling perorangan dan kelompok.



Mata Pencarian

- 6.346 remaja putus sekolah (melebihi dari 5.850 yang direncanakan) diberi pelatihan tentang kecakapan hidup dan kecakapan kerja utama.



Know About Business-KAB (Tahu tentang Bisnis)

Sampai dengan Mei 2011:

- 877 guru telah diberi pelatihan tentang KAB, yang merupakan 98% dari target (46% laki-laki dan 54% perempuan).
- 57,898 siswa telah diberi pelatihan tentang KAB, yang merupakan 178% dari target 32.500 siswa (49,5% laki-laki dan 50,5% perempuan)



Start Your Business/SYB (Memulai Bisnis Anda)

By January 2011:

- 7.462 remaja menerima pelatihan SYB (83% dari 9.000 yang direncanakan; 48,6% laki-laki dan 51,4% perempuan).
- 2.468 remaja memulai bisnis (hanya SYB) (32% dari target; 43% laki-laki dan 57% perempuan).



2005 Edition

PRTA: Masalah yang tersembunyi, sulit dijangkau dan terabaikan

Sejumlah literatur dan penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga (PRT) tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Pengguna jasa atau majikan tidak merasa berkewajiban memberikan perlindungan kepada PRT akibat ketiadaan kontrak kerja. Ini membuat para PRT, terlebih pekerja rumah tangga anak (PRTA), menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar dan kerja mereka. Mereka pun tidak memiliki standar upah minimum, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Berbagai tradisi dan budaya di Indonesia, seperti budaya 'ngenger' di Jawa, menempatkan PRTA bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai 'titipan' dengan tujuan anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik di kota. Namun pada kenyataannya, banyak dari mereka tidak disekolahkan dan bahkan diminta bekerja membantu keluarga tempat mereka tinggal dengan jam kerja yang panjang dan tanpa bayaran.

PRTA merupakan masalah yang tersembunyi karena berada pada ranah domestik, bekerja di balik pintu rumah pribadi dan tidak terjangkau pengawas ketenagakerjaan. PRTA juga tidak dianggap sebagai masalah tenaga kerja karena mereka dianggap hanya "membantu" meski mereka harus melakukan berbagai pekerjaan domestik selama lebih dari 40 jam seminggu dan tanpa waktu libur yang jelas.



2012 - 2017:

Menuju Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)



Pada 2011, ILO mengadopsi Konvensi No. 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan standar global pertama bagi 67 juta PRT di seluruh dunia. Konvensi

ini menegaskan: PRT, seperti juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Anak-anak di bawah usia minimum bekerja tidak diperbolehkan bekerja menjadi PRT.

Sebagai tindak lanjut dari konvensi ini, pada 2012, ILO dengan dukungan dari Kementerian Perburuahan Amerika Serikat (USDOL) mengembangkan sebuah proyek untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT bernama "Proyek Mempromosikan Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga untuk Mengakhiri Pekerja Rumah Tangga Anak" (PROMOTE) pada 2013.

Proyek ini bertujuan untuk menghapuskan PRTA melalui penguatan kapasitas organisasi PRT dalam mempromosikan pekerjaan yang layak bagi PRT. Proyek ini menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi yang menangani masalah PRT seperti Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT), Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT-BM) dan JARAK (Jaringan LSM Penghapusan Pekerja Anak). Proyek juga membangun kapasitas para mitra untuk mengatasi masalah PRTA sesuai dengan Konvensi ILO No. 138, 182 dan 189.

Berikut sejumlah capaian proyek ILO-PROMOTE dalam upaya penghapusan PRTA di Indonesia selama durasi proyek dari tahun 2013 hingga awal tahun 2018:

- **Peluncuran dan pelaksanaan Kampanye Hak Kita Sama mengenai pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA.** Kampanye ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan dan pemutaran antologi tujuh kisah PRT dan PRTA, penerbitan buku "Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik Tembok Ruang Domestik, pelibatan selebriti Indonesia dalam kegiatan peluncuran, penerbitan kasus-kasus terkait PRT dan PRTA, pembuatan foto-foto bercerita dan sebagainya.

- **Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA melalui berbagai bentuk media dan media sosial.** Media telah terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat luas melalui berbagai kegiatan seperti beasiswa dan penghargaan media, program bincang-bincang di radio dan televisi serta iklan layanan masyarakat.

Selain itu kampanye melalui sosial media juga dilakukan para mitra ILO, termasuk para PRT, menggunakan akun Facebook, Twitter serta jurnalisme warga. Akun Facebook "Stop Pekerja Anak" yang dikelola oleh JARAK, misalnya, sangat aktif mengampanyekan penghapusan PRTA dan saat ini telah disukai sekitar 2.300 orang.

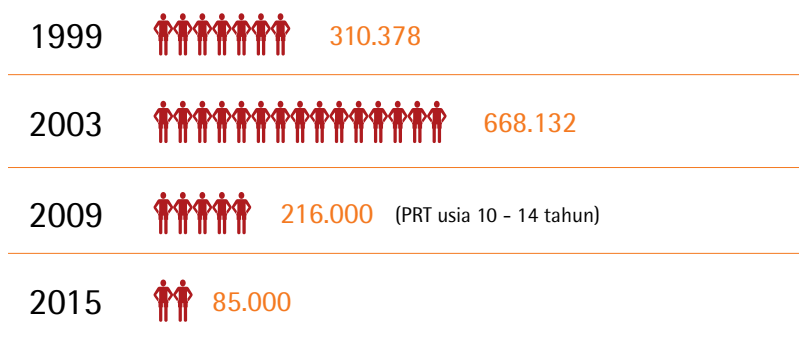
- **Pengembangan metodologi untuk memperkirakan jumlah PRT dan PRTA dengan lebih baik menggunakan data dari survei yang ada (Sakernas dan Susenas).** Angka perkiraan ini telah digunakan proyek untuk berbagai kegiatan, termasuk advokasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat luas tentang penghapusan PRTA.
- **Pelibatan Forum Anak sebagai agen perubahan.** Anggota Forum Anak di sejumlah wilayah (Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur) telah mengikuti pelatihan tentang perlunya perlindungan PRT serta pentingnya penghapusan PRTA. Dengan mengikuti pelatihan ini, Forum Anak telah diperkuat sebagai agen perubahan di masyarakat guna mendukung upaya penghapusan PRTA, terutama di antara teman sebaya mereka.
- **Kode Etik Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI).** Kode Etik ini memberikan panduan kepada para anggota APPSI mengenai penerapan usia minimum untuk bekerja sebagai PRT (18 tahun) dalam perekrutan dan penempatan PRT serta melindungi PRT yang ditempatkan melalui kegiatan pemantauan pasca penempatan. Sanksi akan diberikan kepada anggota APPSI yang melanggar. Pemantauan berkala APPSI menemukan bahwa sekitar 70 persen anggotanya telah memverifikasi usia minimal tersebut dan tidak merekrut ataupun menempatkan PRT di bawah usia 18 tahun.

- **Sosialisasi Pencegahan PRTA oleh PGRI dan ILO.** Bersama dengan PGRI, ILO mengembangkan Pedoman Guru untuk Mencegah PRTA di Sekolah. PGRI sudah melatih guru-guru di wilayah-wilayah pengirim PRT di sejumlah provinsi.
- **Pengembangan Pemantauan Berbasis Komunitas bersama dengan mitra.** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT menegaskan perlu adanya kewajiban memantau PRT yang disalurkan dan kewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan melalui penguatan jejaring pengawasan hingga di tingkat rumah tangga (RT). Pemantauan berbasis komunitas ini kemudian menjadi pendekatan strategis karena melibatkan pihak otoritas di lingkungan rumah tangga seperti RT/RW. Pemantauan ini sudah dikembangkan di 35 RT di empat provinsi (Banten, Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur) dan banyak kelurahan dari berbagai wilayah menyatakan tertarik untuk mereplikasi sistem pemantauan ini.
- **Pengarusutamaan isu penghapusan PRTA ke dalam kebijakan Kota Layak Anak.** Khusus di Kota Makassar, program penanggulangan PRTA telah terintegrasi ke dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak di mana salah satu indikator keberhasilannya adalah tidak adanya pekerja anak, termasuk PRTA. ILO bersama mitranya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, memastikan bahwa isu PRTA ini terintegrasi ke dalam Klaster 5, yaitu penghapusan pekerja anak.
- **Tersusunnya Rencana Aksi Sektor (RAS) Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak.** RAS Penghapusan PRTA telah disusun oleh pemangku kepentingan dengan dimotori oleh JARAK dan telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. RAS Penghapusan PRTA melengkapi Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2022 dengan secara lebih rinci memetakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam upaya penghapusan PRTA di Indonesia.
- **Pengembangan 'Penanganan Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga: Buku Pegangan untuk PRT dan Organisasi PRT'.** PRT mempunyai posisi strategis dalam penghapusan pekerja rumah tangga anak. Buku Pegangan ini disusun untuk menjadi materi pelatihan bagaimana PRT bisa menyumbang pada upaya penghapusan pekerja anak di sektor pekerja rumah tangga.

Berbagai capaian proyek ILO-PROMOTE ini merupakan hasil dari berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan ILO bersama para mitra sebelumnya selama lebih dari dua dasawarsa. ILO bersama para pemangku kepentingan telah memulai upaya penghapusan PRTA sejak tahun 1990.

Studi awal terkait PRTA di Indonesia dilakukan pada 1990. Studi ini diawali dengan melihat keterkaitan antara perdagangan anak dan PRT yang dilakukan oleh Prof. Dr. Irwanto di bawah Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Studi tersebut memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi PRT di Indonesia, yang juga mencakup alasan utama mengapa anak menjadi PRT dan keterlibatan agen tenaga kerja termasuk keluarga dan sanak saudara dalam perekrutan PRTA.

Grafis informasi jumlah PRTA (10–18 tahun) berdasarkan Survei BPS



Mengacu pada hasil studi tersebut, pemerintah Indonesia pun mulai mengakui keberadaan PRTA dan memasukkan pekerjaan rumah tangga sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. PRTA menjadi salah satu dari 13 bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN BPTA), dan upaya penghapusan ini dijabarkan dalam Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2022. Ini menjadi bagian penting dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan pekerja anak di sektor rumah tangga.

Usia minimum untuk bekerja sebagai PRT

Usia minimal untuk bekerja sebagai PRT menjadi wilayah abu-abu karena berbagai pandangan yang tidak menganggap PRT sebagai pekerja dan budaya 'ngenger' bagi anak-anak yang bekerja di sektor rumah tangga. Pandangan ini akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran dalam melihat usia minimum untuk bekerja sebagai PRT.

Sebagian menafsirkan usia minimum untuk bekerja sebagai PRT adalah 15 tahun, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 138 yang menyebutkan bahwa usia minimum bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Karenanya, anak-anak yang berusia antara 15–18 tahun diperbolehkan bekerja di sektor rumah tangga dengan syarat hak-hak dasar mereka terpenuhi seperti tidak melakukan tugas yang membahayakan, tidak dipekerjakan di malam hari, pembatasan jam kerja, kesempatan mendapatkan pendidikan dan bermain dengan teman sebaya.

Mengingat tantangan dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi kerja PRT dan memastikan dilaksanakannya syarat-syarat mempekerjakan anak di sektor pekerja rumah tangga, maka pada tahun 2015, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT yang juga menetapkan usia 18 tahun sebagai batasan usia minimum untuk memasuki pekerjaan di sektor rumah tangga.



ILO bersama para mitranya kemudian mengembangkan model-model penanganan masalah PRT dan mengujicoba model-model tersebut melalui Program Aksi untuk Menarik dan Mencegah PRTA khususnya PRTA dibawah usia 15 tahun di wilayah Tambun (Bekasi) dan Pamulang (Tangerang). Upaya penarikan ini dilakukan dengan memberikan keterampilan alternatif bagi PRTA, seperti menjahit serta pendidikan dasar. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak baik sebagai PRT ataupun pekerjaan lainnya.

Sementara berbagai program pencegahan di daerah pengirim, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencegah anak-anak putus sekolah, terutama pendidikan dasar. Model-model ini diharapkan dapat terus dikembangkan di wilayah lain di Indonesia.

Upaya pengembangan model penarikan dan pencegahan ini kemudian dikembangkan menjadi kegiatan kampanye yang lebih kongkrit pada tahun 2001-2003. ILO bersama mitranya melakukan kegiatan kampanye dan advokasi bertajuk Hari Libur bagi PRT melalui berbagai media. Kampanye Hari Libur ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi PRT untuk mewujudkan pekerjaan yang layak bagi mereka.

ILO juga terus membangun dan memperkuat pengetahuan terkait PRTA melalui berbagai penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Upaya ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai faktor-faktor pendorong dan penyebab serta risiko menjadi PRTA sebagai dasar advokasi dan penguatan kebijakan penghapusan PRTA baik di tingkat nasional dan lokal. Survei dilakukan oleh ILO



bersama para mitranya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai PRTA, termasuk alasan dan motivasi anak-anak menjadi PRT serta wilayah geografis daerah penerima maupun pengirim.

Selama rentang waktu 2005–2014, upaya pencegahan dan penarikan PRTA lebih ditingkatkan, terutama melalui intervensi pendidikan termasuk memperluas akses dan kualitas pendidikan di daerah pengirim. Perluasan akses pendidikan ini, misalnya, memastikan bahwa anak-anak di daerah pengirim dapat melanjutkan pendidikan, setidaknya pendidikan dasar.

ILO bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah berupaya memberikan akses pendidikan dasar sembilan tahun baik melalui pembangunan sekolah satu atap maupun sekolah terbuka dan program pendidikan kesetaraan paket B. Sementara peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan cara pelatihan pembelajaran yang bersifat partisipatif kepada para guru maupun kegiatan alternatif seperti program pra-vokasional. Program pra-vokasional merupakan program pelatihan keterampilan yang terfokus pada proses dan bukan hasil produksi, terutama proses terbentuknya kecakapan sosial dan personal seperti rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama.

Pada awal 2010, ILO bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta LSM Rumpun Gema Perempuan (RGP) mengembangkan modul sosialisasi dan pelatihan untuk mencegah dan menarik PRTA. Modul ini dikembangkan berdasarkan berbagai pengalaman ILO dan para mitranya dalam mengembangkan model program aksi di berbagai lokasi di Indonesia.

ILO kemudian mengadaptasi modul Hak, Tanggung Jawab dan Keterwakilan (3R) yang telah digunakan di berbagai negara untuk memberikan penguatan kapasitas kecakapan hidup baik sosial maupun personal bagi anak-anak sehingga mereka mampu melakukan pencegahan diri dari BPTA, termasuk menjadi PRTA. Modul ini digunakan para mitra sebagai perangkat untuk melakukan pencegahan dan penarikan di bawah program aksi untuk PRTA.

Upaya inovatif pun dikembangkan melalui pelibatan aktif para jurnalis dan organisasi media massa serta pelibatan anak-anak sekolah usia 12–17 tahun, termasuk PRTA, dalam pembuatan video diari dan foto bercerita mengenai pengalaman keseharian mereka dengan PRT dan suka-duka bekerja sebagai PRTA. Bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH), pembuatan video ini dilakukan sendiri oleh anak-anak dan PRTA dari pengidentifikasian kisah, penulisan skrip, pengambilan gambar hingga penyelesaian video dan foto bercerita. Serangkaian video diari dan foto bercerita ini mendapat sambutan besar dan telah ditayangkan di sejumlah jaringan cinema terbesar Indonesia serta sekolah-sekolah yang menjangkau setidaknya 1,500 pelajar di empat provinsi: Jakarta, Surabaya, Lampung dan Makassar.

ILO dan Perjalanan Penghapusan PRT

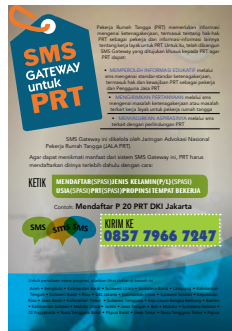
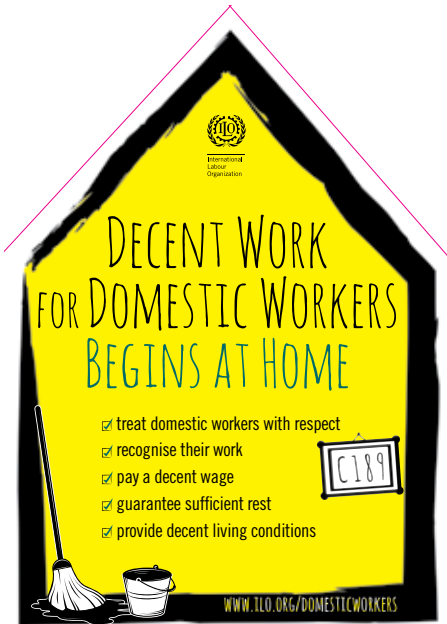
Proyek terkait PRTA	Tujuan Proyek
► 2001 – 2003 Menangani Perdagangan Pekerja Rumah Tangga Migran di Asia (Didanai Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Program PRTA – Tahap 1)	Menjawab kekhawatiran PRT termasuk PRTA di Asia melalui advokasi dan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas dan pendampingan langsung terhadap PRT khususnya PRTA.
► 2002 – 2005 Memerangi Perdagangan Anak untuk Dipekerjakan dan Eksploitasi Seksual di bawah Program ILO-IPEC	Mendukung proses regional untuk pengembangan kerangka kebijakan terkait perdagangan anak untuk ketenagakerjaan dan eksploitasi seksual termasuk peningkatan pengetahuan, kapasitas serta pencegahan dan pertolongan bagi korban.
► 2004 – 2006 Memerangi Eksploitasi PRTA (Didanai Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Tahap 2)	Melanjutkan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk memerangi eksploitasi PRTA dan mengembangkan jejaring di antara negara ASIA.
► 2007 – 2011 Proyek Dukungan terhadap Program Terikat Waktu untuk Penghapusan BPTA – Tahap 2 (Didanai oleh Departemen Perburuan Amerika Serikat)	Berkontribusi terhadap pengurangan jumlah anak yang terlibat dalam BPTA.
► 2013 – 2014 Proyek Memerangi Pekerja Anak melalui Pendidikan (Didanai Pemerintah Kerajaan Belanda)	Terfokus pada intervensi pendidikan sebagai upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak. Selain PRTA, proyek ini juga bekerja untuk pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak lainnya.
► 2002 – 2018 Proyek Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT untuk Penghapusan PRTA (PROMOTE) (Didanai oleh Departemen Perburuan Amerika Serikat (USDOL)	Pengurangan PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi-organisasi PRT agar dapat mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT dan penghapusan PRTA secara efektif.

A di Indonesia

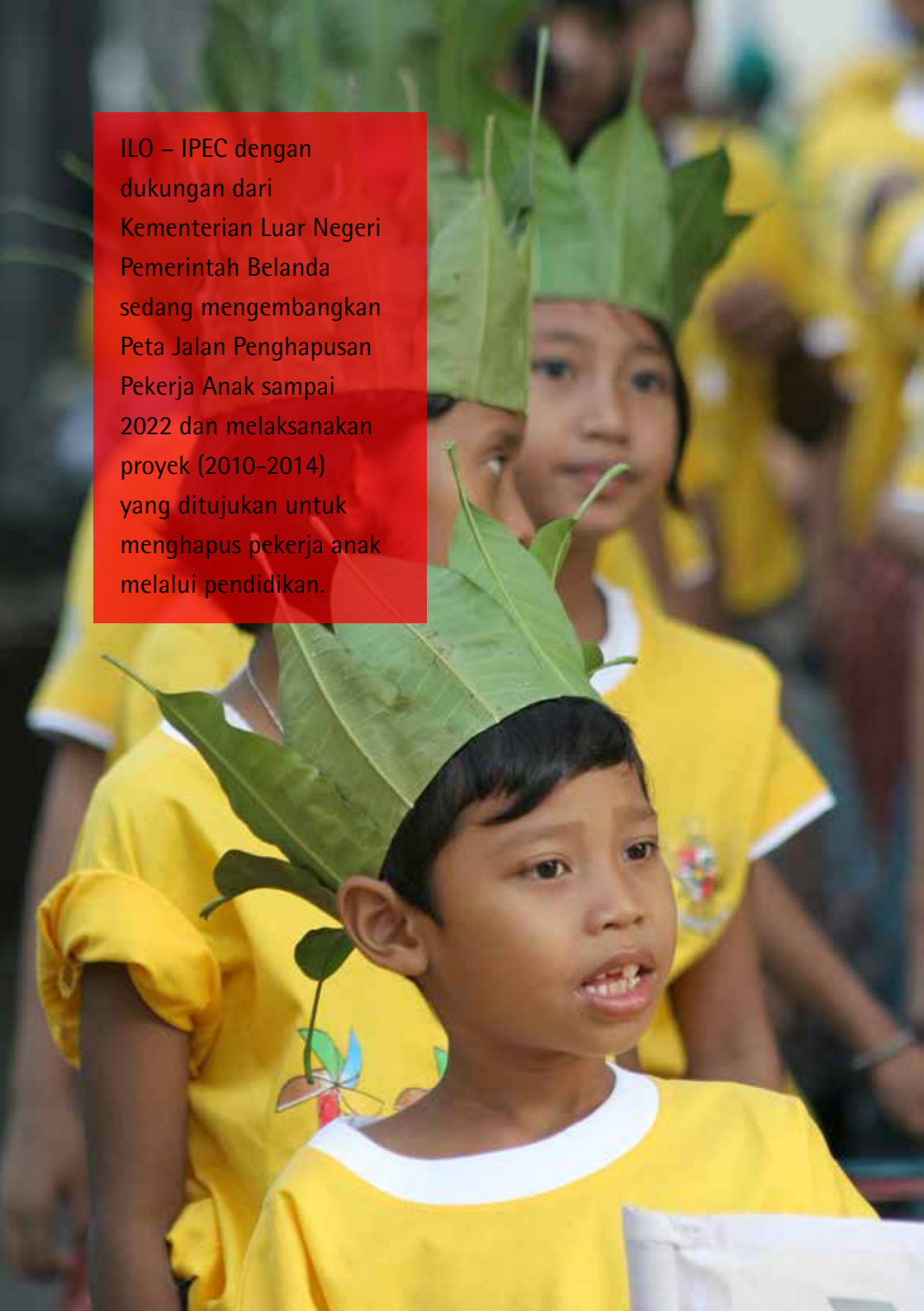
Capaian

- Kampanye satu hari libur dalam seminggu untuk PRT bersama Radio Republik Indonesia (RRI)
 - Penayangan drama radio, "Bunga-bunga di Atas Padas" sebanyak 20 episode (periode percontohan) bersama RRI
 - Mobilisasi publik mengenai perlindungan hak anak, khususnya bagi PRTA melalui revisi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 tentang perekrutan PRT dan menambahkan kebijakan terkait perlindungan hak PRT dan PRTA.
 - Sanggar pelatihan keterampilan dan pendidikan non-formal di Jakarta dan Tangerang bersama YKAI dan RGP.
 - Memulai kontak dengan Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan modul dan kurikulum untuk PRTA.
- Penelitian PRTA dengan Unika Atma Jaya
 - Program Aksi Percontohan Penarikan PRTA di Bekasi, Tambun dan Pamulang bersama dengan YKAI dan RGP
 - Survei mengenai PRTA di Bekasi dan Jakarta Timur bersama dengan Universitas Indonesia dan YKAI
- Penerbitan buku berjudul Bunga-bunga di Atas Padas mengenai suka duka kehidupan PRTA.
 - Keberlanjutan drama radio bersama RRI untuk 20 episode.
 - Pembuatan 10 film pendek mengenai PRTA, bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan pemilihan film *Srengenge* (Matahari) sebagai film terbaik.
 - Beasiswa bagi anak-anak putus sekolah bekerja sama dengan perusahaan swasta
 - Kampanye usia minimum bekerja dan hari libur bersama dengan YKAI, APSI dan KPPA.
- Pengembangan model program aksi untuk penarikan dan pencegahan PRTA di Jakarta, Jawa Barat, Lampung dan Jawa Timur
 - Penguatan Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan BPTA di Indonesia
- Pengembangan program aksi untuk penarikan dan pencegahan PRTA di Jakarta dan Jawa Barat (Sukabumi).
 - Peningkatan kesadaran terkait PRTA dan pentingnya pendidikan bagi semua melalui kampanye video diari dan pertunjukan drama musik oleh Kelompok PRTA Bekasi.
- Pengembangan Kode Etik PRT termasuk usia minimal untuk PRT oleh APPSI
 - Pengembangan model Sistem Pemantauan berbasis Komunitas
 - Peningkatan kesadaran melalui berbagai kegiatan media, audio-visual, drama, media sosial dan berbagai bentuk kampanye lainnya
 - Bersama PGRI mengembangkan modul Sosialisasi Pencegahan PRTA di sekolah-sekolah
 - Pengarusutamaan isu-isu PRTA ke dalam kebijakan yang ada baik di tingkat lokal maupun nasional
 - Pengembangan Rencana Aksi Sektoral Penghapusan PRTA di Indonesia





ILO – IPEC dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda sedang mengembangkan Peta Jalan Penghapusan Pekerja Anak sampai 2022 dan melaksanakan proyek (2010-2014) yang ditujukan untuk menghapus pekerja anak melalui pendidikan.



Dasawarsa Berikutnya:

Indonesia Terbebas dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada 2022

Indonesia telah membuat komitmen untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2022, dan telah mengidentifikasi pengurangan kemiskinan dan pendidikan sebagai strategi utama untuk memenuhi tujuan ini. Kolaborasi antara Indonesia dan ILO selama dua dasawarsa terakhir telah meletakkan dasar yang kuat untuk tujuan ini, dan telah menyoroti sejumlah petunjuk utama bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang akan datang sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak. Ini termasuk:

- Meningkatkan pendidikan yang terintegrasi pada program pengentasan kemiskinan dan menghapus pekerja anak.
- Memastikan ketersediaan keterampilan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan menuju pekerjaan yang layak.
- Meningkatkan semua program untuk mencegah anak-anak putus sekolah.
- Menyelaraskan program pendidikan kesetaraan dengan sistem pendidikan formal.
- Melaksanakan ujian nasional bagi siswa yang belajar di sistem pendidikan non-formal agar mereka termotivasi untuk mencapai standar yang sama dengan pendidikan formal. Ini akan meningkatkan nilai pendidikan non-formal dari perspektif siswa dan calon pemberi kerja.

Terlepas dari kemajuan yang dibuat, jalan menuju penghapusan pekerja anak masih memiliki tantangan, terutama di antara sektor yang masih "tersembunyi". ILO, misalnya, telah menyoroti munculnya pekerja anak di sektor peternakan unggas, dan perdagangan anak laki-laki untuk eksploitasi seksual komersial. Insiden anak-anak penyandang disabilitas yang terlibat sebagai pekerja anak di masyarakat juga sedang diteliti, dan cenderung menargetkan ke tindakan intensif untuk menghapus fenomena yang merugikan ini.

ILO-IPEC dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda sedang mengembangkan Peta Jalan Menuju 2022 dalam Penghapusan Pekerja Anak dan melaksanakan proyek (20120 – 2014) yang bertujuan untuk menghapus pekerja anak melalui pendidikan. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memperkuat kebijakan terkait pekerja anak dan pendidikan, mengupayakan aksi untuk meningkatkan kesempatan bagi pekerja anak atau yang rentan, sehingga mendapatkan manfaat dari pendidikan. Pada Februari 2013, ILO menerima dukungan dari Departemen Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan proyek PROMOTE: Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga sebagai Upaya untuk Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak. Bersama dengan para mitra di sektor pekerja rumah tangga, proyek ini akan fokus pada strategi yang unik untuk penghapusan pekerja anak di sektor rumah tangga. Proyek yang berdurasi 3,5 tahun ini akan dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia: Jakarta dan sekitarnya, Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.



Inisiatif-inisiatif Baru

Kesempatan Pendidikan Kedua bagi Pekerja Anak Usia 15-17 tahun



Sebagai upaya memberikan kesempatan pendidikan kedua, ILO-IPEC bekerja sama dengan *International Garment Training Center* (IGTC)–suatu lembaga pelatihan garmen– melaksanakan pelatihan vokasional dan kecakapan hidup bagi 30 mantan pekerja anak dan anak-anak yang rentan menjadi pekerja anak. Pelatihan sebagai operator mesin jahit ini memiliki pasar yang sangat luas di industri garmen di Indonesia karena tekstil dan garmen menjadi salah satu

kontributor terbesar dalam industri ekspor di Indonesia.

Pelatihan yang diberikan selama enam minggu ini menekankan pada teknik dasar menjahit yang berorientasi pada industri ekspor. Pelatihan diperkaya dengan program pendidikan kecakapan hidup yang menggunakan perangkat pelatihan ILO tentang pemberdayaan anak-anak, kaum muda dan keluarga terhadap hak-hak, tanggung jawab dan keterwakilan (3Rs). Perangkat ini ditujukan untuk memberdayakan anak-anak sehingga dapat melindungi diri mereka sendiri dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dengan menggunakan pendekatan yang sama, Kementerian Sosial di bawah Direktorat Kesejahteraan Anak, melanjutkan pemberian pelatihan vokasional dan kecakapan hidup ini untuk mantan anak-anak jalanan usia 15 -1 7 tahun di IGTC. Lembaga ini didirikan pada tahun 2001 dan beranggotakan produsen-produsen garmen, pembeli, pendidik vokasional dan bank.

“Saya hanya lulusan SD, karena keluarga saya tidak memiliki uang untuk sekolah ke SMP. Setelah lulus dari kursus ini, saya ingin menjadi perancang baju,”
Pemi (16), salah satu peserta pelatihan.



Kemitraan Publik–Privat–Komunitas Lokal dalam Memerangi Pekerja Anak di Indonesia

Pada Juni 2011, ILO menginisiasi sebuah forum yang bertajuk "**Kemitraan Publik–Privat– Komunitas Lokal Memerangi Pekerja Anak di Indonesia**". Forum ini memberikan kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat umum, perusahaan dan juga komunitas agar memiliki pendekatan yang terintegrasi menuju penghapusan pekerja anak. Bagi peserta di sektor perusahaan, forum ini telah memberikan informasi yang berharga untuk merancang dan melaksanakan inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) terkait pekerja anak dan memberikan mereka kesempatan untuk mengidentifikasi potensi mitra di berbagai organisasi, terutama di komunitas lokal.

Forum ini memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan kemitraan publik–privat–komunitas lokal yang lebih kuat dan lebih baik. Melalui dialog dan pertukaran pengalaman, kerja sama di antara ketiga mitra ini semakin meningkat di waktu mendatang. Para mitra ini memiliki peranan yang potensial untuk keberlangsungan inisiatif dalam upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia.

Better Work Indonesia, program kemitraan yang unik antara ILO dan *the International Finance Corporation* (IFC) bertujuan meningkatkan ketaatan atas standar ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap pekerja anak dan mempromosikan persaingan yang sehat di industri. Sebuah panduan saat ini sedang dikembangkan untuk industri yang menemukan pekerja di bawah dan di atas 15 tahun termasuk dengan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menangani pekerja anak jika kasus pekerja anak ditemukan.

Lokakarya Kerjasama Selatan-Selatan dalam Memerangi Pekerja Anak

Pada Maret 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ILO dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda menggelar Lokakarya Regional Selatan-Selatan untuk melihat upaya penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam memerangi pekerja anak. Lokakarya ini mengidentifikasi tantangan dalam melaksanakan aksi menghapuskan pekerja anak dan mendiskusikan upaya penguatan kolaborasi serta jaringan antara negara-negara Selatan dan Asia Timur.

Enam negara peserta (Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Timor-Leste dan Indonesia) memaparkan laporan serta menggarisbawahi beberapa permasalahan spesifik di negara masing-masing dalam menangani pekerja anak. Sesi-sesi tematik seperti perlindungan sosial, pekerja anak dan pendidikan serta kebijakan pasar tenaga kerja juga dibicarakan dalam lokakarya ini. Lokakarya ini menyimpulkan sesi Rencana Strategi di mana tiap negara menggunakan daftar cek dari rancangan Peta Jalan ASEAN dalam Menghapus BPTA pada tahun 2016 untuk mengidentifikasi capaian-capaian, serta tantangan yang ada.

Lokakarya Kerjasama Selatan-Selatan ini dipertimbangkan sebagai inisiatif yang inovatif bagi negara lain untuk melaksanakan lokakarya ini secara berkala sebagai upaya mempercepat penghapusan pekerja anak di antara negara-negara regional.



Advokasi Pekerja Anak yang Inovatif



ILO bersama Yayasan Kampung Halaman (YKH) telah mengembangkan dua bentuk film dan foto bercerita mengenai keseharian pekerja anak dan pendidikan serta peran serta PRT dari sudut pandang anak-anak usia 12-17 tahun. Film ini dikemas dalam bentuk video, foto bercerita dan situs interaktif yang berjudul "Aku Masa Depanmu, Indonesia" (AMDI) dan "Teman Remaja Teman Setara: Sembilan Cerita Persahabatan Kami dengan Pekerja Rumah Tangga" (TRTS) yang diluncurkan pada 2012 dan 2015.

Kedua bentuk kampanye ini merupakan bagian dari kegiatan kampanye yang dilakukan ILO bersama para mitranya untuk menghapuskan pekerja anak dan untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga (PRT) serta penghapusan PRT anak (PRTA).

Untuk AMDI, film ini dibuat oleh pekerja anak sendiri yang bekerja di lima sektor pekerja anak, yaitu: anak jalanan, pemulung, PRTA, pekerja pabrik dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di Jakarta, Sukabumi dan Makassar. Untuk TRTS, video dan foto bercerita ini diproduksi 25 remaja usia 12-17 tahun, yang terpilih dari ratusan remaja, di Jakarta dan Makassar, memperlihatkan peran PRT dalam kehidupan mereka, interaksi keseharian dengan PRT dan kehidupan PRT dari sudut pandang anak remaja mereka.

Dengan menggunakan kalimat dan pemilihan ide cerita mereka sendiri, AMDI terdiri dari enam film pendek dengan durasi waktu 60 menit, sementara TRTS terdiri dari sembilan video dan foto bercerita dengan durasi waktu 90 menit.

"Saya ingin para penonton film ini menyadari betapa sulitnya menjadi pekerja rumah tangga. Pekerjaan ini tidak semudah yang orang-orang bayangkan, terutama ketika para majikan marah-marah," *Imah, (17 tahun), peserta film dari sektor pekerja rumah tangga.*

"Masyarakat cenderung mempunyai perspektif negatif dan menghakimi apa yang teman-teman dan saya lakukan. Melalui film ini, saya berharap masyarakat umum dapat memiliki pemahaman yang lebih baik bahwa kami tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami sebenarnya tidak memilih apa yang kami lakukan saat ini," *Putri, (18 tahun), peserta film dari eksploitasi seksual anak.*

"Masyarakat cenderung melihat kami sebagai pembuat onar. Tidak mudah tinggal di jalan, karena saya dan teman-teman berisiko tertabrak dan diganggu oleh anak-anak lainnya dan orang dewasa. Melalui video ini, saya berharap orang-orang akan melihat anak jalanan secara berbeda," *Surip, (14 tahun), peserta film dari sektor anak jalanan.*

"Saya bangga mempunyai ibu seorang PRT. Saya berharap masyarakat lebih menghargai pekerjaan PRT di dalam rumah-rumah mereka. Karena dengan keberadaan PRT seperti ibu saya mereka dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan mereka di luar rumah" *Muhamad Andika, (17 tahun), peserta kegiatan TRTS dari Makassar.*

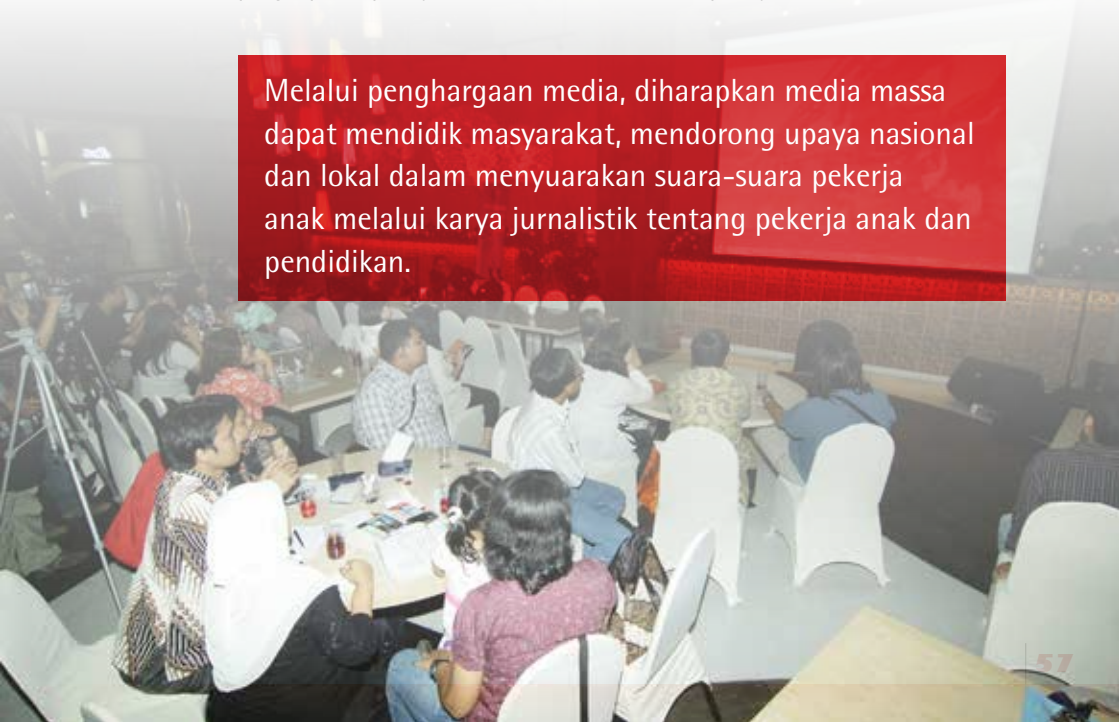
Kerjasama dengan Media untuk Meningkatkan Kesadaran tentang Pekerja Anak

ILO dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan media terkait permasalahan pekerja anak dan pendidikan serta pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA melalui program beasiswa dan penghargaan media.

Melalui kegiatan beasiswa media, sejumlah media terpilih untuk membuat liputan mendalam tentang permasalahan-permasalahan di atas. Sementara penghargaan media diberikan pada 2012 untuk peliputan komprehensif dan mendalam mengenai pekerja anak secara umum, sementara pada 2016 untuk peliputan mengenai PRT dan PRTA.

Penghargaan media ini bertujuan untuk mengapresiasi karya-karya jurnalistik dalam menghasilkan produk-produk jurnalisme bermutu, yang mampu menggambarkan berbagai persoalan terkait pekerja anak serta PRT dan PRTA. Penghargaan media ini merupakan bagian dari kampanye ILO untuk menyoroti berbagai upaya nasional, termasuk media massa, dalam mendorong penghapusan pekerja anak, termasuk PRTA, serta pekerjaan layak untuk PRT.

Melalui penghargaan media, diharapkan media massa dapat mendidik masyarakat, mendorong upaya nasional dan lokal dalam menyuarakan suara-suara pekerja anak melalui karya jurnalistik tentang pekerja anak dan pendidikan.



(Catatan Kaki)

- i Sidang Konferensi Nasional Pertama tentang Perburuhan Anak, YKAI, Jakarta, 1993
- ii ILO. 1993. Laporan Perburuhan Dunia. ILO, Jenewa.
- iii Ibid.
- iv BPS. 1995. Tenaga Kerja di Indonesia 1994. BPS, Jakarta.
- v Berdasarkan data ILO, selama periode ini, 55 program aksi (tiap program memiliki anggaran di atas \$3.000) dan 16 program mini (dengan anggaran kurang dari \$3.000) dilaksanakan di seluruh Indonesia, pada provinsi yang diketahui memiliki insiden tinggi perburuhan anak, termasuk Yogyakarta. Sektor yang ditargetkan adalah pertanian, manufaktur, dan perikanan (dengan berfokus pada perikanan lepas pantai, atau jermal). Semua program ini dibiayai oleh ILO.
- vi Melalui pelaksanaan program aksi bersama Kementerian Dalam Negeri (Upaya untuk Mengarusutamakan Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional (1996-1997), lebih dari 100 kader dilatih untuk mengidentifikasi manfaat program untuk anak-anak, terutama program bagi keluarga miskin. Ini adalah salah satu dari 14 program baru dan tujuh mini program yang didanai ILO dengan dukungan dari pemerintah Jerman.
- vii Data ILO dari 2003.
- viii Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; penggabungan muatan dari Konvensi ILO No. 182 (terutama paragraf 3) ke dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pekerjaan yang Membahayakan Moral, Keselamatan, dan Kesehatan Anak-anak. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membentuk Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak-anak. Ini adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.
- ix ILO. 2006. Pasar Ketenagakerjaan Muda Indonesia dan Dampak Putus Sekolah Dini terhadap Pekerja Anak. Jakarta.
- x PPA-PKH adalah program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan PKSA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Kementerian Kesejahteraan Sosial.
- xi Data Pelacakan TBP 2 menunjukkan bahwa di antara 2.759 orangtua dari pekerja anak mengambil manfaat dari program yang dilaksanakan oleh ILO dan rekan, 60% mengakui bahwa mereka telah meningkatkan produktivitas dan/atau pendapatan setelah berpartisipasi.

Donor



Pemerintah Kerajaan Belanda



Departemen Perburuhan
Amerika Serikat (USDOL)



Konfederasi Serikat
Pekerja Jepang (RENGO)